



Melihat Gerakan Sosial dan Aspirasi Kerja Kaum Muda Sesudah Desentralisasi di Indonesia

Unearthing Youth's Social Movement and Work Aspirations after Decentralization in Indonesia

Gilang Mahadika

Program Studi Pascasarjana Antropologi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

Diterima: 28 Juni 2022; Direview: 14 Juli 2022; Disetujui: 8 Agustus 2022

Abstrak

Tulisan ini ingin menunjukkan dinamika kehidupan kaum muda dan aspirasi mereka dalam penentuan pekerjaan di daerah yang sudah otonom. Dari beberapa tinjauan pustaka yang telah dikumpulkan, menunjukkan bahwa kaum muda menghadapi beberapa tantangan dalam pencarian kerja di daerah otonom masing-masing. Hal ini disebabkan oleh dampak dari desentralisasi yang justru lebih memapankan elite-elite lokal yang sudah ada, serta hanya identitas etnis tertentu saja yang diuntungkan dan menjadi semakin kuat karena beriringan dengan kebijakan otonomi daerah. Hal ini berdampak pada kaum muda yang kian terpisahkan oleh kelas-kelas sosial dan segregasi etnisitas di suatu wilayah otonom. Gerakan kaum muda yang muncul di tengah ketidakadilan desentralisasi dapat menjadi refleksi atas transformasi hak kerja dan kondisi sosial-politik yang terjadi di Indonesia.

Kata Kunci: kaum muda, desentralisasi, gerakan sosial, masyarakat sipil, aspirasi kerja

Abstract

This paper expects to reveal the dynamics of youth generations and their work aspirations in deciding jobs in the regional autonomy. According to the collected data references, it shows that youths face certain challenges in search of work in respective regencies. It is due to the impacts of decentralization that it turns out to be more establishing local elites and empowering local-based ethnic identities who have more advantages ever since the autonomy policy was enacted. It surely provides impacts for the youths which have become more segregated by the social class and ethnicities in the regencies. Hence, the emergence of youth movements in the uneven decentralization can be considered as reflection of work rights transformation and changing socio-political circumstances taking place in Indonesia.

Keywords: youth generation, decentralization, social movements, civil society, work aspirations

How to Cite: Mahadika, Gilang. (2022). Melihat Gerakan Sosial dan Aspirasi Kerja Kaum Muda Sesudah Desentralisasi di Indonesia. ***Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya (Journal of Social and Cultural Anthropology)***, 8 (1): 25-42

*Corresponding author:

E-mail: gilangmahadika@mail.uam.ac.id

ISSN 2460-4585 (Print)

ISSN 2460-4593 (Online)

PENDAHULUAN

Setelah krisis politik dan moneter di tahun 1997 dan 1998, diikuti dengan periode 'reformasi', beberapa pengamat dan ilmuwan sosial telah menunjukkan bahwa Indonesia telah memasuki fase transisi dari pemerintah otoritarian mengarah pada sistem pemerintah yang lebih demokratis. Sistem ini menunjukkan bagaimana masyarakat sipil (*civil society*) telah memainkan peran penting yang membuat pemerintahan menjadi lebih transparan dalam menjalankan kepengaturannya. Transisi ini juga telah diikuti dengan proses desentralisasi yang berimplikasi pada pemberian kewenangan terhadap otonomi daerah.

Kaum muda juga menjadi perhatian penting karena mereka dianggap sebagai penggerak adanya perubahan sistem politik pemerintah yang lebih demokratis. Maka dari itu, kaum muda dapat dianggap sebagai penggerak dalam perjuangan masyarakat sipil. Hal ini tergambar dalam tulisan etnografi Doreen Lee (2016) yang berjudul *Activist Archives: Youth Culture and Political Past in Indonesia*, menunjukkan kisah menarik para aktivis 98' sebagai para demonstran generasi muda dalam upayanya mendobrak kekuasaan militeristik dan otoritarian Orde Baru. Di samping itu, kaum muda aktivis 98' juga dipandang sebagai cerminan marginalnya posisi mereka selama

hidup di bawah rezim Orde Baru. Oleh karena itu, para *pemuda* ini menciptakan gerakan bersama-sama, menyuarakan hak-hak mereka sebagai masyarakat sipil dengan slogan "*semangat pemuda*" warga negara Indonesia. Hal ini dilakukan juga sebagai upaya mereka membangun relasi yang lebih intim dan afektif sesama mereka (Lee, 2016, p. 11). Dari sini kemudian terlihat bahwa gerakan pemuda adalah gerakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintahan yang lebih demokratis, serta mengedepankan kepentingan masyarakat sipil.

Istilah 'masyarakat sipil' menjadi istilah yang cukup penting. Hal itu disebabkan karena perlu kehati-hatian dalam melihat proses desentralisasi yang seringkali tidak mengedepankan demokrasi, melainkan memperkuat elitisasi dari suatu etnis dan/atau agama tertentu dari suatu kelompok di suatu wilayah tertentu. Seperti dalam tulisan Andi Faisal Bakti (2007) mengenai masyarakat di Wajo, Sulawesi Selatan, menunjukkan proses desentralisasi adalah sebuah proses perubahan sosial yang terjadi begitu lambat. Ditambah, para elit yang telah mapan di sana berupaya terus mempertahankan *privilese* mereka, selagi dengan mudahnya mereka beradaptasi di setiap perubahan keadaan politik yang baru. Hal ini kemudian menjadi menarik untuk melihat dinamika aspirasi kaum muda yang

membawa latar belakang etnis yang perlu diperhatikan terutama wacana berbeda-beda, termasuk etnis yang mengenai 'masyarakat sipil' yang dapat memegang posisi elite atau kelas menengah, berpengaruh ke tiap-tiap lini kehidupan berupaya mempertahankan hak-hak kerja sosial-budaya masyarakat di suatu daerah, mereka di wilayah otonom. Oleh karena itu, termasuk aspirasinya untuk memperoleh penentuan pekerjaan juga tidak lepas dari hak-hak yang sama dalam pemilihan kondisi sosial-politik yang berada di suatu pekerjaan. daerah tertentu.

Di samping itu, konsepsi mengenai 'masyarakat sipil' menurut Partha Chatterjee (2001) menjadi problematik karena meskipun secara legal-formal masyarakat pada umumnya dinyatakan sebagai 'masyarakat sipil' dalam pandangan negara. Namun, kenyataannya tidak semua masyarakat atau bahkan generasi muda dapat dianggap sebagai 'masyarakat sipil'. Hal itu dikarenakan hak-hak mereka yang tidak atau belum terakomodasi oleh sistem pemerintahan modern. Mereka yang berada dalam posisi marginal akan dianggap oleh Chatterjee sebagai masyarakat politik (*political society*) yang tengah memperjuangkan hak-hak mereka sebagai 'masyarakat sipil' (*civil society*). Proses desentralisasi kemudian memiliki implikasi penting dalam melihat pergolakan politik di tingkat lokal antara penduduk asli dengan pendatang, atau pun mempertajam konsekuensi pembentukan dikotomi antara etnis non-pribumi dengan pribumi, migran dengan masyarakat lokal, generasi tua dengan kaum muda, dan seterusnya. Hal ini

Proses desentralisasi di Indonesia

pada umumnya beriringan dengan proses demokratisasi. Namun, ada hal yang perlu diperhatikan bahwa, pergeseran dari pemerintah yang terpusat mengarah ke pemerintah kedaerahan adalah hal yang tidak sama dengan pergeseran dari rezim otoritarian ke rezim yang demokratis, serta juga tidak sama dengan peran negara yang kuat bergeser menjadi peran masyarakat sipil yang lebih kuat. Oleh karena itu, lemahnya peran negara tidak berarti bahwa secara langsung menjadikan sistem yang lebih demokrasi. Sebaliknya, desentralisasi dapat pula diikuti dengan bentuk baru dari rezim 'otoritarian' yang sifatnya lebih 'kedaerahan'.

Meskipun demikian, beberapa studi mengenai desentralisasi biasanya menaruh perhatiannya pada proses demokratisasi¹. Sedangkan, yang lainnya lebih menaruh perhatian pada dinamika desentralisasi². Tulisan ini kurang lebih akan melihat bagaimana dinamika desentralisasi dan proses demokratisasi rupanya tidak berjalan mulus. Hal ini karena membuat 'para elite'

lokal dan kaum muda yang membawa latar belakang etnis tertentu memainkan peran politik lebih besar dibandingkan dengan yang lain. Hal ini karena menguatnya identitas lokal etnis yang muncul bersamaan dengan kebijakan otonomi daerah. Maka dari itu, permasalahan demokrasi, kehidupan multikulturalisme, dan masyarakat sipil pada masa otonomi daerah perlu menjadi buah perbincangan penting karena memiliki implikasi dalam perolehan hak-hak kewarganegaraan, terutama dalam penentuan aspirasi kerja dan kesempatan-kesempatan lainnya di wilayah otonom.

Kaum muda di masa desentralisasi menjadi hal yang perlu dibahas. Tidak sekadar karena jaranganya studi mengenai hal ini, melainkan juga menunjukkan bahwa kaum muda menjadi cerminan masuknya sistem pemerintahan Indonesia yang lebih demokratis. Namun di waktu yang bersamaan, secara kontradiksi, kaum muda perlu menghadapi permasalahan ketidakpastian, kecemasan, dan kompetisi pekerjaan di wilayah-wilayah otonom masing-masing. Kurang lebih tulisan ini ingin menunjukkan bagaimana dinamika gerakan sosial kaum muda di masa sesudah desentralisasi, serta membayangkan aspirasi mereka dalam pemilihan pekerjaan di masa yang lebih demokratis. Maka dari itu, kaum muda menjadi refleksi atas

transformasi hak kerja dan gerakan sosial-politik yang terjadi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Sebagaimana penelitian kualitatif, penelitian pustaka telah dilakukan dalam kajian ini. Dimulai dengan mengumpulkan beberapa informasi mengenai gerakan anak muda yang muncul di tengah transisi sistem politik Orde Baru ke Reformasi, dan kemunculan gerakan kaum muda di era demokrasi. Referensi yang telah dikumpulkan kemudian dibaca dan juga diperkuat dengan laporan-laporan yang dikeluarkan oleh institusi transnasional (*World Bank*) dan nasional untuk melihat statistik pemuda Indonesia. Kemudian, data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan konsep “masyarakat sipil”, yang mana kaum muda dikategorisasi berdasarkan kelas-kelas dan etnisitas. Lalu, penelitian nanti berakhir dengan kesimpulan yang diperoleh dari kumpulan tinjauan pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Selayang Pandang Gerakan Kaum Muda dan Kerja di Indonesia

Apabila mengacu pada sekretariat PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam penggunaan istilah ‘pemuda’ atau ‘generasi muda’, pemaknaannya seringkali berubah-ubah. Seseorang dapat dikatakan pemuda apabila berumur di antara 15-24 tahun

(Setiawan & Oktavianti, 2020). Kasus di Indonesia, definisi pemuda barangkali dapat berubah tergantung keadaan, terutama terjadi karena perubahan kondisi demografi, keuangan, ekonomi, dan sosial-budaya (Adioetomo, et al, 2014). Namun, apabila mengacu Undang-Undang Republik Indonesia (RI) Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, maka istilah 'pemuda' didefinisikan sebagai seseorang dalam rentang umur 16-30 tahun. Oleh karena itu, apabila mengikuti undang-undang, maka istilah pemuda adalah orang yang berada di rentang usia 16-30 tahun. Keberadaan usia tersebut apabila berada di tahun ini, mereka adalah pemuda kelahiran 1990-an dan 2000-an.

Dengan jumlah penduduk yang kurang lebih hampir 270 juta, Indonesia menempati negara nomor empat terbesar di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Dalam (Agustina, et al, 2019) menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia berjumlah 64,19 juta yang tersebar dari barat hingga timur Indonesia. Itu artinya generasi muda hampir mencapai seperempat atau 24,01 % dari keseluruhan penduduk Indonesia (Agustina, et al, 2019: 9). Maka dari itu, Indonesia dianggap memiliki potensi besar dalam menyediakan angkatan kerja karena jumlah terbanyak penduduk Indonesia berada dalam usia yang produktif (dari 15-64 tahun) (The World

Bank, 2019). Fenomena ini juga yang umum disebut sebagai *bonus demografi*, sebuah keadaan di mana penduduk produktif melampaui jumlah penduduk yang sudah tidak produktif secara ekonomi. Hal ini yang kemudian perlu menjadi perhatian dalam pemerintah yang demokratis, mengedepankan hak-hak kerja kaum muda di wilayah otonomnya masing-masing.

Namun, sejarah hubungan pemerintahan dengan kaum muda seringkali menunjukkan hubungan yang tidak harmonis. Kaum muda di masa Orde Baru menunjukkan posisi mereka yang marginal di mata pemerintah Suharto. Saya Shiraishi (1997) dalam artikel etnografisnya yang berjudul *Young Heroes: The Indonesian Family in Politics*, menunjukkan bagaimana generasi tua di masa Orde Baru kerap memberikan stigma negatif terhadap kaum muda. Definisi kebudayaan yang relevan di zaman Orde Baru ialah yang mengedepankan asas-asas kekeluargaan. Kaum muda pun kemudian dianggap kelompok yang sulit untuk mengikuti kepatuhan dari kehidupan ideal keluarga menurut rezim pemerintah Suharto,

Youths are immature, and therefore their voice does not count. But they are wild, and their [...] lust and heat can be unleashed, because they are immature and do not know self-restraint. They need to be watched carefully and guided from behind if necessary (Shiraishi, 1997: 157).

(Kaum muda adalah kaum yang kekanak-kanakan, dan oleh karena itu, aspirasi mereka tidak bisa dipertimbangkan atau terhitung. Namun, mereka juga liar, hasrat dan amarah mereka dapat sewaktu-waktu dikerahkan, karena mereka bertindak kekanak-kanakan dan tidak mengenal pentingnya pengendalian diri. Mereka perlu diawasi dengan hati-hati dan dibimbing dari belakang apabila perlu).

Dari sini pandangan antara generasi tua dengan generasi muda pun berbeda. Terutama generasi tua pada masa Orde Baru seringkali membangun narasi idealnya mengenai kehidupan keluarga. Doreen Lee (2016: 152)) dalam buku etnografinya juga memaparkan bagaimana kehidupan keluarga yang ideal di masa Orde Baru. Keluarga dianggap sebagai ruang yang nyaman dan familiaritas tersebut digambarkan melalui kehidupan berumah tangga. 'Ritual' antar-jemput yang seringkali digaungkan juga ditujukan agar menjamin anggota-anggota keluarga selalu berada di wilayah yang aman dan terkendali. Sosok otoritas *bapak* sebagai pemimpin keluarga (patriarki) menjadi penting dalam membangun jaminan keselamatan dan kenyamanan. Oleh karena itu, kesamaan antara berumah tangga dan kehidupan bernegara kerap diwujudkan dalam pemikiran Suharto. Bahkan, hampir

di setiap ada perayaan sosial, seperti pernikahan, upacara nasional, dan peristiwa-peristiwa lainnya perlu menunjukkan sosok Bapak Suharto,

Bapak Suharto was the ultimate Father Figure in this regard, giving blessings to those who shook his hand or bowed over it with appropriate reverence. Appearing in person at elite wedding receptions, state ceremonies, and occasional propaganda-generating trips to rural areas and the provinces, Suharto was an accessible dictator . . . who distributed his personal touch through New Order photographic souvenirs that families and businessmen displayed in their homes and offices of Suharto shaking their hands at these privately public events (Lee, 2016: 152).

(Bapak Suharto adalah Figur Bapak dalam hal ini, memberikan berkat kepada mereka yang menjabat tangan atau menundukkan kepala dengan rasa hormat kepadanya. Memperlihatkan sosoknya sebagai orang elite di resepsi pernikahan, upacara negara . . . Suharto sebagai diktator yang dapat ditemui di mana-mana . . . yang mendistribusikan sentuhan kepribadiannya melalui foto-foto yang dipajang oleh keluarga-keluarga dan para pebisnis di rumah-rumah atau pun kantor-kantor dengan gambar Suharto menjabat tangan mereka di setiap acara-acara umum).

Kembali pada kaum muda di masa Orde Baru, rupanya memang mereka terlihat

jarang tinggal di rumah. Apalagi mereka mereka terhadap pemerintah negara. generasi muda kelas menengah yang telah Seperti yang diketahui secara umum bahwa memiliki standar representasi populernya hak-hak sipil paling mendasar di masa sebagai identitas mahasiswa yang Suharto seringkali dibatasi atau pun berpendidikan di Indonesia. Hal ini dilarang. Gagasan baru kemudian memperlihatkan bagaimana kaum muda berkembang dan mampu melandasi dianggap sebagai golongan pemberontak pemikiran aktivisme yang dilakukan oleh dalam konsep bayangan 'rumah' dan mahasiswa sebagai *moral force* (dorongan 'keluarga' di masa Orde Baru. Hal tersebut moral). Istilah *moral force* diambil dari juga dibuktikan karena kebanyakan kaum (Aspinall, 2012) yang memiliki arti bahwa muda lebih banyak tinggal di kos selama gerakan kaum muda (mahasiswa) tersebut menempuh jenjang pendidikan. Lee didorong oleh prinsip-prinsip moral dan menunjukkan bahwa keberadaan kos etika yang tidak terkontaminasi oleh dunia menjadi simbol mengenai kurangnya politik yang korup.

kepengaturan, dan juga yang terpenting Namun, di tahun 1970-an adalah makna kebebasan bagi kaum muda menunjukkan bagaimana pemerintah tidak untuk terlepas dari jeratan bayangan ideal menyukai bermacam-macam gerakan yang kehidupan keluarga yang cenderung dibangun kaum muda hingga mereka dipaksakan (Lee, 2016: 152). Namun, memberlakukan NKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) yang menekan adanya aktivitas agitasi politik di lingkungan kampus. Namun, hal tersebut tidak membuat mereka menemui diri mereka sendiri yang kaum muda diam, melainkan mereka juga rentan (*fragile*) karena status sosial melakukan tindakan lebih masif yang dapat mereka yang telah disematkan pada mereka dilihat dari jumlah aktivis yang kian sebagai 'anak' atau menempatkan posisi bertambah tiap tahunnya (Aspinall, 2012), mereka sebagai 'warga negara kedua' di terutama puncaknya di tahun 1997, terjadi bawah rezim Suharto. krisis keuangan di Asia, menjadi momen

Citra kaum muda yang telah penentu para kaum muda untuk menuntut dibangun sebagai 'pemberontak' dan 'sulit agar terjadinya gerakan 'reformasi' bagi diatur' ini yang kemudian membuat mereka sistem politik di Indonesia.

berani untuk melakukan suatu mobilisasi Memasuki era reformasi, kebijakan besar demi memperjuangkan hak-hak sipil yang paling kentara adalah upaya

pemerintah memberlakukan desentralisasi. FBR (Forum Betawi Rempug) dan FPI (Front Kebijakan ini kemudian tidak benar-benar Pembela Islam) (Nowak, 2021: 12). berjalan dengan mulus seperti yang Kelompok-kelompok ini biasanya akan dibayangkan pemerintahan pusat yang niat mengontrol bagian-bagian informal di suatu awalnya menyerahkan kekuasaan dan daerah yang jauh dari perhatian pemerintah otoritas mereka ke pemerintah daerah. daerah. Bagi para pemuda miskin, organisasi Namun, kenyataannya menimbulkan tersebut menawarkan pekerjaan bagi problematik baru di tingkat daerah. Seperti mereka dan setidaknya membuat mereka dicontohkan dalam (Nowak, 2021, p. 12), di merasa tenang. Di samping itu, mereka juga dunia perkotaan seperti kota Jakarta, dapat memperoleh apresiasi dan rasa ketidaksetaraan sosial telah memanifestasi hormat antar sesama anggotanya (Wilson, dirinya sendiri dalam segregasi sosial. 2019). Dari kasus ini menunjukkan adanya Generasi muda dari kelas menengah lebih kompleksitas yang dihadapi kaum muda di banyak menghabiskan waktu mereka untuk era yang lebih demokratis justru pergi berbelanja ke *mall* dan menjaga status menciptakan kelas-kelas sosial di antara sosial mereka dengan bekerja di sektor kaum muda sendiri. Kaum muda yang tidak formal. Hal ini seperti digambarkan dalam diuntungkan kemudian berafiliasi dengan kisah etnografis dari Lizzy van Leeuwen gerakan-gerakan dari organisasi informal. (2011) berjudul *Lost in Mall: An Hal ini dilakukan sebagai strategi untuk Ethnography of Middle Class Jakarta in the memperjuangkan hak-hak sipil mereka, 1990s*, di mana kelas menengah biasa terutama agar memperoleh akses mencari pekerjaan yang mapan seperti pendidikan, aspirasi kerja, dan penghidupan membuka usaha sendiri, bekerja di luar yang lebih baik di daerahnya sendiri. negeri, di rumah sakit ternama, dan menjadi pegawai negeri dengan jabatan tinggi.

Sedangkan, generasi muda dari Vedi R. Hadiz (2004) dalam artikelnya yang berjudul, *Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of perwakilannya masyarakat miskin perkotaan Neo-institutionalist Perspectives*, menunjukkan bahwa proses desentralisasi lebih banyak mencari pekerjaan seadanya, rupanya hanya menciptakan institusional terutama di sektor-sektor informal. Bahkan, atau kelembagaan baru yang lebih di masa demokrasi ini para pemuda yang kedaerahan. Jadi, pada dasarnya sama saja termasuk dalam masyarakat miskin seperti kelembagaan pemerintah perkotaan seringkali menjadi target bagi sebelumnya. Dalam pandangan umum, organisasi kemasyarakatan (ormas), seperti

seharusnya desentralisasi dapat politik yang ada dalam suatu wilayah menyediakan peluang-peluang dan tertentu. Aspirasi kerja juga dapat partisipasi-partisipasi yang baik bagi berhubungan dengan kehidupan politik, masyarakat lokal dalam pengambilan seperti yang ditunjukkan Ian Wilson keputusan. Namun, sebaliknya, mengenai kaum muda miskin perkotaan desentralisasi memberikan peluang yang yang mulai berafiliasi dengan organisasi semakin kuat bagi para elite lokal, kelas informal (seperti FPI dan FBR) untuk menengah, dan organisasi *preman* yang memperoleh pekerjaan. Gambaran ini masih mengatasnamakan pemuda, yang menjadi gambaran umum mengenai kaum mengambil kesempatan ini untuk maju dan muda, aspirasi kerja mereka, dan gerakan mengakses lebih banyak peluang pekerjaan sosial di masa awal-awal desentralisasi dan karir sebagai politisi. Contohnya, seperti diberlakukan. Ada baiknya untuk melihat di Sumatra Utara, domain politik organisasi lebih jauh bagaimana dinamika aspirasi 'pemuda', seperti *Pemuda Pancasila*— kerja kaum muda di masa yang sudah organisasi yang muncul di masa Orde Baru otonom.

untuk menghadapi Partai Komunis Indonesia di tahun 1960-an, dengan organisasi tandingannya bernama *Ikatan Pemuda Karya* (IPK), menunjukkan bahwa beberapa anggota-anggota yang masuk dalam organisasi tersebut kemudian dapat duduk dalam parlemen di tingkat provinsi (Hadiz, 2004: 715).

Maka dari itu, permasalahan kaum muda di Indonesia tidak dapat dilihat hanya dari permasalahan penyerapan pekerjaan karena bonus demografi. Melainkan, kaum muda juga menjadi aktor dalam arena politik demi memperjuangkan hak-hak sipil mereka, terutama dalam perolehan akses pekerjaan daerahnya masing-masing. Permasalahan pekerjaan kemudian dipandang juga tidak lepas dari dinamika

Kaum Muda dan Kelas Sosial di Daerah Otonom

Dari perjalanan peristiwa sejarah demokrasi ini bukan berarti akhir dari gerakan pemuda progresif dalam dunia politik Indonesia. Demokratisasi dari sistem pemerintah Indonesia telah membawa peningkatan yang masif dan perluasan peran masyarakat sipil. Hal ini ditunjukkan para aktor (kaum muda) mulai dapat berperan aktif, menyuarakan pendapatnya hampir di setiap tingkatan daerah hingga nasional (pusat). Bahkan, beberapa kaum muda yang dulunya aktivis kemudian mulai mengembangkan karirnya menjadi politisi (Lee, 2016: 187). Namun, beberapa kaum muda ini hanya merepresentasi kelas

menengah dari suatu daerah tertentu saja. Kaum muda kelas pekerja yang kebanyakan hidup di daerah otonom, yang masih dalam taraf berkembang menjadi daerah industri, tentunya memiliki dinamika yang berbeda dibandingkan kaum muda yang digambarkan Doreen Lee dan Lizzy van Leeuwen sebelumnya.

Kasus etnografi menarik yang ditulis oleh Nicolaas Warouw (2014) berjudul *Working Class Revisited: Class Relations in Indonesian Provincial Towns*, kurang lebih dapat menunjukkan bagaimana perjuangan kaum muda mencari pekerjaan stabil di wilayah otonomnya sendiri. Warouw berpendapat secara garis besar bahwa beberapa wilayah desentralisasi yang jauh dari pemerintah nasional (ibukota negara) terdapat kelas pekerja yang merasakan ketidakadilan karena praktik-praktik industrialisasi. Ia juga menunjukkan bahwa desentralisasi dalam prosesnya seringkali diperebutkan oleh otoritas pemimpin atau tokoh 'kebudayaan', dan elite 'lokal' yang sudah ada sebelumnya. Pemimpin lokal tersebut juga memperoleh manfaat yang besar dengan membangun relasi patronase dengan masyarakat lokal di dalamnya. Meskipun, dalam kasus ini masyarakat lokal kerap kali enggan untuk dijadikan klien bagi para pemimpin lokal tersebut.

Penelitian Warouw berada di dua tempat yang berbeda. Pertama berada di

Cilegon, Banten, dan kedua berada di Pekalongan, Jawa Tengah. Ia mencoba mengkaji permasalahan yang ada di dua wilayah tersebut dengan pendekatan kelas dan pekerja (*labour*). Hal tersebut dilakukan karena kedua wilayah tersebut memiliki kesamaan yaitu banyaknya pabrik-pabrik manufaktur baik dibangun oleh pebisnis lokal maupun transnasional. Dalam persentase, para pekerja industri berjumlah 21,59% dari keseluruhan pekerja di Cilegon pada tahun 2008 dan 21,83% di Pekalongan pada tahun 2005 (Warouw, 2014: 52). Namun, yang menarik dan jarang dilihat dari kajian-kajian pekerja sebelumnya, bahwa kehidupan para pekerja itu sendiri yang sebenarnya beragam (heterogen) karena membawa latar belakang identitas yang berbeda-beda.

Para pekerja tetap dalam industri adalah mereka yang memperoleh kestabilan dalam pekerjaan mereka, seperti para manajer dan bawahan-bawahannya atau *supervisors* (pengawas). Kebanyakan dari mereka adalah pekerja berpendidikan dan terampil, serta memegang tanggung jawab penting dalam administrasi dan produksi. Ditambah, mereka lebih banyak menikmati perlindungan hak-hak pekerja yang dinyatakan dalam perjanjian kerja. Upah mereka jauh lebih tinggi dari upah minimum regional, dan mereka dapat memperoleh bonus dan tunjangan yang

bermacam-macam. Di Cilegon, posisi ini diyakini kebanyakan adalah golongan para 'migran' yang berasal dari berbagai wilayah di Jawa dan dekat pulau Sumatra (Warouw, 2014: 52). Bahkan, para pekerja yang diwawancara oleh Warouw mengatakan bahwa ketegangan etnis antara pekerja migran dengan orang lokal sendiri seringkali terjadi. Para pekerja tetap ini juga dapat diidentifikasi dari tamatnya pendidikan mereka, baik tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas), Sekolah Vokasi, dan/atau tingkat sarjana dalam program studi tertentu.

Tidak seperti pekerja tetap, melainkan para pekerja kontrak yang tidak langsung berhubungan dengan perusahaan atau di bawah susunan pekerjaan *outsourcing* (perusahaan pihak ketiga atau kontraktor). Para pekerja kontrak ini adalah pekerja yang bertugas dalam kerja non-produksi, seperti menjadi petugas kebersihan, tukang kebun, satpam, dan lain sebagainya. Mereka biasanya terletak di bawah hierarki tempat kerja—tidak karena pekerjaan mereka, melainkan konsekuensi dari sifat pekerjaan yang tidak ada perlindungan. Mereka berada di luar dari aturan pekerja, di mana seharusnya pekerja dan negara bertanggung jawab terhadap mereka. Di Cilegon, Warouw melihat bagaimana organisasi kepemudaan di tingkat desa, yang seringkali disebut Karang

Taruna, direkrut untuk menjadi para pekerja pabrik tanpa adanya kontrak formal (atau perjanjian kerja). Kebanyakan para pekerja muda industri ini adalah orang lokal Cilegon itu sendiri (Warouw, pg. 53). Mereka tidak memiliki akses mekanisme normal, seperti promosi jabatan, bonus, tunjangan, dan juga dana pensiun.

Ketika mereka sedang tidak dipekerjakan oleh pabrik. Penduduk lokal Cilegon berusaha saling membantu tetangganya masing-masing untuk bekerja sebagai tukang bangunan, membenarkan atap rumah tetangganya sendiri. Beberapa anak muda seringkali mencari pekerjaan yang ilegal, seperti istilah mereka sehari-hari, *nyekrap*, mencuri bahan material metal dari industri, untuk dijual di pasar gelap (Warouw, pg. 54). Pekerjaan selain di manufaktur, mereka juga memproduksi mlinjo (kudapan tradisional yang terbuat dari kacang mlinjo) yang nantinya dijual ke pasar. Selain itu, mereka juga ada yang menjadi nelayan (mencari ikan). Namun, beberapa ada yang mengeluhkan adanya polusi air akibat dari kontaminasi aktivitas industri di Cilegon (Warouw, 2014: 56). Dari sini kemudian terlihat bagaimana desentralisasi tidak berjalan dengan semestinya, di mana para pemuda lokal perlu diberdayakan oleh elite-elite pemerintah daerah. Namun, kenyataannya sebaliknya, pemerintah lokal

lebih mengedepankan percepatan pertumbuhan ekonomi-bisnis dengan merekrut para pekerja terampil dari luar, dan tidak berupaya memberdayakan orang lokal sendiri.

Atas keadaan ini, pekerja lokal Cilegon juga tidak tinggal diam. Terkadang mereka mengadakan perkumpulan informal setelah bekerja di pabrik. Awalnya, perkumpulan itu diadakan untuk merespon partai politik yang mencoba mencalonkan kembali dirinya untuk pemilihan umum di tahun 2009. Para pekerja muda ini juga membawa anak-anak muda yang belum bekerja, dan para pekerja kontrak untuk membicarakan mengenai permasalahan elite lokal dan ancaman pengangguran yang mereka alami, serta hubungan mereka dengan para migran (Warouw, 2014: 60). Pada akhirnya, dari perkumpulan informal tersebut dapat memunculkan suatu tindakan politik di antara mereka. Di tahun 2009 yang lalu, terdapat pemilihan legislatif, para penduduk lokal tersebut mencoba memecah suara untuk menundukkan Golkar (Golongan Karya), sebagai partai dari pemimpin lokal yang tengah menjabat saat itu. Mengingat bahwa Golkar telah menjadi partai dominan jauh sebelum 'reformasi' terjadi, dan bahkan di antara mereka ada yang diberikan uang agar memilih mereka kembali. Namun, kenyataannya, tahun 2009 menjadi tahun

terakhir supremasi partai tersebut di sana. Upaya yang dilakukan penduduk lokal dan generasi muda di sana dapat dianggap sebagai sebuah gerakan untuk menunjukkan bahwa pemimpin lokal di sana tidak berhasil dalam menyediakan pemberdayaan kepada mereka yang berada dalam posisi marginal di daerahnya sendiri (Warouw, 2014: 61).

Salah satu kasus ini mampu menunjukkan bahwa masa desentralisasi yang secara umum memiliki niat agar dapat memberdayakan penduduk lokal, namun kenyataannya hanya memperkuat kedudukan para elite lokal. Ditambah, dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat, para elite lokal lebih memilih pekerja yang terampil dari luar daripada memberdayakan penduduk lokal agar dapat memperoleh hak-hak dan akses pendidikan dan pekerjaan yang lebih baik. Maka dari itu, desentralisasi di sini perlu menjadi kritik penting bahwa tidak selamanya memberdayakan masyarakat lokal, melainkan hanya membangun kelembagaan baru yang justru menguntungkan para elite lokal. Kaum muda yang dipinggirkan menjadi salah satu komponen penting untuk melancarkan tindakan politik dan gerakan sosial, seperti dalam kasus ini, menurunkan partai politik dan pemimpin 'lokal' yang tidak mampu mengakomodasi hak-hak mereka sebagai warga sipil.

Aspirasi Kerja Kaum Muda dan Etnisitas di Daerah Otonom

Salah satu anekdot menarik dari tulisan Wenty Marina Minza (2014) yang berjudul *Ethnicity and Young People's Work Aspirations in Pontianak* menunjukkan pernyataan dari salah satu informan yang mewakili etnis Dayak sangat lah antusias karena di saat pemilihan daerah, pemimpin gubernur di sana adalah orang Dayak.

Lihat itu Dayak! Sekarang pemimpin gubernurnya orang Dayak, segala pesan-pesan penting dibuat oleh orang Dayak... sebentar lagi segala pegawai negeri akan menjadi orang Dayak (Minza, 2014: 11).

Memang, dalam pernyataan informan tersebut menurutnya cukup berlebihan. Namun, perasaan adanya perwakilan dari etnis dari dirinya yang bekerja dalam birokrasi rupanya dapat memberi pengaruh bagi peluang masa depan anak-anak muda yang merepresentasi etnis di sana. Sebenarnya, pemimpin gubernur di sana juga lebih banyak menaruh perhatiannya pada pencarian keseimbangan dalam kabinetnya. Mengenai etnisitas seharusnya tidak menjadi permasalahan dalam proses rekrutment pekerjaan. Seorang perempuan Melayu yang menjadi asisten Minza juga

tidak menyangka sebelumnya. Ia melihat nantinya gubernur tersebut akan lebih banyak menunjuk orang Dayak agar dapat masuk dalam kabinetnya (Minza, 2014: 111).

Pontianak yang terletak di Kalimantan Barat menjadi lokasi penelitian Minza. Ia mula-mula mengamati sepanjang pinggiran jalan yang tumbuh beberapa *ruko* (rumah toko) dan warung kopi. Di sana terlihat banyak etnis Cina yang sering berlalu-lalang, bekerja di *ruko*, menjual beberapa pakaian, dan ada pula yang beristirahat dan duduk di warung kopi. Sembari mengamati aktivitas di ruang publik, ia pun menyadari adanya hal yang kontras dibandingkan saat menemui kantor pemerintahan daerah, sekolah, dan beberapa layanan kesehatan. Tidak ada etnis Cina di tempat-tempat administrasi negara dan layanan kesehatan. Hal itu yang akhirnya mencuri perhatian Minza bahwa daerah di Pontianak secara etnis tersegregasi.

Sama halnya dengan orang Dayak, orang Melayu pun memiliki aspirasi bekerja menjadi pegawai negeri sipil di daerahnya. Salah satunya seperti seorang perempuan Melayu yang telah menyelesaikan pendidikan terakhirnya di tingkat sarjana, mengatakan bahwa definisi pekerjaan yang layak (*decent work*) adalah ketika dirinya dapat bekerja sebagai

pegawai negeri sipil (PNS). Oleh karena itu, dapat menjadi PNS adalah suatu aspirasi kerja bagi kaum muda yang berpendidikan di Pontianak.

Beberapa kaum muda Dayak dan Madura juga menginginkan untuk menjadi PNS. Namun, apa yang membuat beberapa etnis ini lebih memilih untuk menjadi PNS sebagai pekerjaan yang dianggap layak? Dilihat dari pendapatan yang diterima sebagai PNS jauh lebih sedikit dibandingkan membangun bisnis layaknya etnis Cina yang ada di sana. Salah satu informan berlatar belakang Dayak memberikan pernyataan (verbatim) mengenai alasan tetap ingin menjadi PNS. Hal itu dikarenakan kaum muda lebih mementingkan jaminan masa depan. Hingga hari tua nanti menjadi PNS akan terjamin pekerjaannya yang stabil atau tidak berganti-ganti.

Di waktu baik dan buruk kita masih punya uang. Apabila dirimu adalah pebisnis, dirimu mendapat jutaan rupiah, namun Anda tidak tahu masa depan... apabila dirimu PNS, bahkan apabila dirimu telah pensiun, Anda tetap memiliki uang untuk anak-anak agar bisa makan. Meskipun ayah saya meninggal, saya masih bisa menikmati hasil dari dana pensiunnya. Saya menginginkan hal itu untuk anak-anak saya nanti, saya ingin menjadi PNS (Minza, 2014: 120).

Table 1: Aspirasi Kerja berdasarkan Etnis (Minza, 2014: 113).

| | | Pilihan pertama | | | Total | |
|-----------|---------|-----------------|--------|---------------------------------|-------|------|
| | | PNS | Bisnis | Pekerja untuk perusahaan privat | | |
| Etnisitas | Melayu | 140 | 10 | 3 | 153 | |
| | | 91.5% | 6.5% | 2% | | |
| | Dayak | 34 | 8 | 2 | 44 | |
| | | 77.3% | 18.2% | 4.5% | | |
| | Madura | 19 | 1 | 0 | 20 | |
| | | 95% | 5% | 0% | | |
| | Jawa | 39 | 1 | 0 | 40 | |
| | | 97.5% | 2.5% | 0% | | |
| | Lainnya | 21 | 3 | 3 | 27 | |
| | | 77.8% | 11.1% | 11.1% | | |
| | Cina | 2 | 30 | 13 | 45 | |
| | | 4.4% | 66.7% | 28.9% | | |
| | Total | | 255 | 53 | 21 | 329 |
| | | | 77.5% | 16.1% | 6.4% | 100% |

Stabilitas, peluang-peluang (seperti uang sampingan dan kredit) dan keamanan yang ditawarkan PNS berbanding terbalik dengan pendapatan yang tidak stabil dan masa depan yang tidak pasti bagi kelas pekerja muda (berlatar etnis Melayu,

Dayak, dan Madura) yang bekerja di sektor-sektor informal. Beberapa kaum muda yang memilih menjadi PNS menekankan juga pentingnya pengakuan sosial (*social recognition*) dari kelompok etnis mereka masing-masing. Maka dari itu, PNS menjadi simbol gengsi dan kekuasaan karena mereka dapat memproyeksikan masa depan mereka, seperti dari mulainya mengakses kredit untuk cicilan rumah, merencanakan pernikahan, hingga ingin memiliki anak yang nantinya ditanam rasa kesuksesan yang sama karena menjadi PNS.

Berbeda dengan kaum muda Cina yang diwawancara oleh Minza, meski beberapa memikirkan pentingnya memiliki jaminan pekerjaan masa depan dengan latar belakang pendidikan yang baik (seperti gelar sarjana). Namun, terkadang, mereka merasakan ketakutan akan kegagalan, karena mereka juga berasumsi bahwa peluang atau kesempatan mereka untuk bisa diterima birokrasi sangatlah kecil. Para perempuan muda Cina yang datang ke Pontianak berkata kepada (Minza, 2014: 113), "Saya dengar bahwa apabila dirimu ingin mendaftar PNS, hanya *putera daerah* yang dipertimbangkan. Orang bukan pribumi seperti etnis Cina tentunya ditolak." Oleh karena itu, dari sini terlihat terdapat perbedaan antara kaum muda etnis cina dan bukan cina dalam memandang aspirasi kerja.

Dalam (Siahaan, 1974: 41-43) menunjukkan bahwa penduduk etnis Cina di Kalimantan Barat meningkat sepanjang 65 tahun dari tahun 1905 dan 1970. Hingga tahun 1970-an, hampir semua etnis Cina di Kalimantan Barat masih menjadi warga negara asing (Minza, 2014: 129). Diskrimansi anti-Cina di masa Orde Baru mengakibatkan beberapa kelas menengah dan atas melakukan naturalisasi. Sedangkan, mereka yang dianggap miskin tidak mampu melakukannya. Namun, semenjak era reformasi, telah membuka ruang yang lebih besar bagi para etnis cina untuk terlibat dalam kegiatan kewarganegaraan (*citizenship*), termasuk seperti terlibat dalam pemungutan suara, akses pendidikan tersier, dan tetap mempertahankan sistem-sistem kepercayaan mereka.

Sebenarnya masih terdapat etnis Cina yang juga terlibat dalam birokrasi dan menjadi elite politik di Kalimantan Barat. Seperti yang ditunjukkan Minza bahwa terdapat Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang beretnis Cina (Minza, 2014: 129). Segala perubahan ini mengubah pandangan kaum muda etnis Cina dalam melihat peluang untuk masuk dalam birokrasi. Meskipun demikian, ekspektasi orang tua dan memori kelam Orde Baru atas diskriminasi etnis Cina masih sangat kuat. Maka dari itu, mereka lebih memilih dan

membayangkan agar anaknya bekerja di luar domain kenegaraan, yakni di sektor-sektor privat. Beberapa informan etnis Cina yang diwawancarai oleh Minza juga mengatakan demikian dan mencoba membandingkan bekerja di sektor privat dengan menjadi PNS,

Orang tua lebih bangga berdagang. Sangat sedikit mengharapkan agar anak mereka menjadi PNS. PNS pensiun pada umur 55, namun dalam perdagangan, setua apa diri kita, kita masih dapat menjalankan bisnis kita sendiri. Upah PNS juga sangat rendah. Apabila menjadi PNS hanya mendapat sejuta rupiah. Lebih baik berdagang, karena ketika kita tua, kita tidak akan tahu kapan kita akan mengalami sakit-sakitan. Dan dengan hanya satu jutaan, apa yang bisa kita makan? (Minza, 2014: 129).

Desentralisasi kemudian tidak sekadar memberi implikasi terhadap penguatan elite lokal dan kelembagaan baru di tingkat lokal. Namun, juga memperkuat identitas etnis di suatu wilayah tertentu. Niat awalnya dari desentralisasi adalah memberikan suara dan pemberdayaan bagi masyarakat lokal untuk dapat terlibat dalam aktivitas birokrasi. Namun, kenyatannya terjadi penciptaan segregasi etnis yang semakin kentara. Seperti halnya para migran dengan pendatang, etnis pribumi dengan non-pribumi, dan masih banyak lagi. Permasalahan demokrasi dan masyarakat

sipil kemudian menjadi penting untuk dikaji lebih jauh dalam kebijakan desentralisasi. Faktanya, hanya beberapa etnis tertentu saja yang kemudian mampu terlibat dalam birokrasi. Meskipun secara legal-formal setiap masyarakat dengan latar belakang etnis yang berbeda-beda diakui sebagai masyarakat sipil, namun realitanya masih banyak yang harus memperjuangkan hak-hak sipil mereka agar memiliki kesamaan akan aspirasi kerja di wilayah yang sudah otonom.

SIMPULAN

Indonesia telah melalui perjalanan sejarah panjang dalam memperbaiki organisasi birokrasi pemerintahan. Lengsernya Suharto pada masa Orde Baru menunjukkan adanya transisi pemerintah yang lebih mengedepankan hak-hak masyarakat sipil. Di samping itu, kaum muda menjadi penting sebagai penggerak adanya perubahan dari rezim otoritarian menjadi rezim yang mengedepankan sistem pemerintah yang demokrasi serta mengedepankan peran masyarakat sipil. Atas perubahan ini, negara pun memberlakukan sistem desentralisasi. Harapannya dari adanya sistem ini, dapat memberikan otonomi di tiap-tiap daerah agar sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat lokal, terutama kaum muda dalam penentuan aspirasi kerja mereka,

serta upaya pemberdayaan sosial untuk orang lokal di wilayah otonom. Namun, kenyataan menunjukkan sebaliknya. Desentralisasi tidak semudah yang dibayangkan. Sistem otonomi daerah kemudian memiliki hambatan dalam menjalankan demokrasi. Hal itu dikarenakan munculnya permasalahan hak-hak sipil masyarakat baik antar etnis dan kelas di antara kaum muda di beberapa wilayah otonom. Oleh karena itu, perlu untuk melihat lebih dalam mengenai permasalahan desentralisasi yang memiliki dampak signifikan terhadap hak-hak dan peluang kerja bagi kehidupan kaum muda sebagai masyarakat sipil di tiap daerah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adioetomo, Sri Moertiningsih, Posselt, Horst & Mcdonald, P. (2014). *UNFPA Indonesia Monograph Series No.2, Youth in Indonesia* (P. P. Mcdonald (ed.)). UNFPA, the United Nations Population Fund. https://indonesia.unfpa.org/sites/default/files/pub-pdf/BUKU_Monograph_No2_Youth_in_Indonesia_ENG_05_Low-res.pdf
- Agustina, Rida, Rachmawati, Yenni, Silviliyana, Mega, Annisa, Linda, & H. W. (2019). *Statistik Pemuda Indonesia 2019* (& R. S. Susilo, Dwi, Harahap, Ida Eridawaty (ed.)). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/publication/2019/12/20/8250138f59ccebff3fed326a/statistik-pemuda-indonesia-2019.html>
- Aspinall, E. (2012). Indonesia: Moral Force Politics and the Struggle against Authoritarianism. In M. Weiss (Ed.), *Student Activism in Asia: Between Protest and Powerlessness* (pp. 153–180). University of Minnesota Press.
- Bakti, A. F. (2007). Family rule in Wajo, South Sulawesi. In G. Nordholt, Schulte Henk & van Klinken (Ed.), *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. KITLV Press.
- Chatterjee, P. (2001). On Civil and Political Society in Postcolonial Democracies. In S. Kavirj, Sudipta & Khilnani (Ed.), *Civil Society: Histories and Possibilities* (pp. 165–178). Cambridge University Press.
- Hadiz, V. R. (2004). Decentralization and Democracy in Indonesia: A Critique of Neo-Institutionalist Perspectives. *Development and Change*, 35(4), 697–718.
- Lee, D. (2016). *Activist Archives: Youth Culture and the Political Past in Indonesia*. Duke University Press.
- Minza, W. M. (2014). Ethnicity and Young People's Work Aspirations in Pontianak. In W. & G. van K. Berenschot (Ed.), *In Search of Middle Indonesia: Middle Classes in Provincial Towns* (pp. 111–132). BRILL.
- Nowak, N. (2021). *Youth, Politics, and Social Engagement in Contemporary Indonesia*. Friedrich-Ebert-Stiftung (FES).
- Setiawan, C., & Oktavianti, T. I. (2020). *The Future of Work for the Asian Youth Country Profile: Indonesia*.
- Shiraishi, S. S. (1997). *Young Heroes: The Indonesian Family in Politics* (Studies on). Southeast Asia Program Publications.
- Siahaan, H. (1974). *Golongan Tionghoa di Kalimantan Barat: Tinjauan Ekonomis Historis*.
- The World Bank. (2019). *Population ages 15-64 (% of total population) - Indonesia*. IBRD - IDA. <https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.1564.TO.ZS?locations=ID>
- Van Leeuwen, L. (2011). *Lost in Mall: an Ethnography of middle-class Jakarta in the 1990s*. KITLV Press.
- Warouw, N. (2014). Working Class Revisited: Class Relations in Indonesian. In W. & G. van K. Berenschot (Ed.), *In Search of Middle Indonesia: Middle Classes in Provincial Towns*. BRILL.
- Wilson, I. (2019). Urban Poor Activism and Political Agency in Post-New Order Jakarta. In *Activist in Transition: Progressive Politics in Democratic*

Gilang Mahadika, Melihat Gerakan Sosial dan Aspirasi Kerja Kaum Muda Sesudah Desentralisasi

Indonesia (pp. 99–116). Cornell
University Press.